BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dianut oleh lebih dari seperempat miliar orang yang ada di seluruh dunia. Kata Islam sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna “berserah diri kepada Tuhan”. Sedangkan secara etimologi, kata Islam memiliki arti “sejahtera, tidak cacat, selamat”.¹ Dalam agama Islam sendiri perkawinan diartikan sebagai perjanjian suci nan agung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi halal. Pernikahan merupakan salah satu intuisi yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim, bahkan Rasulullah pun amat menganjurkan pernikahan bagi mereka yang telah mampu untuk melaksanakannya.²

Dalam Islam sendiri mengajarkan, bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan dengan segala usaha demi menjaga keutuhan serta mampu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Akan tetapi bila mana semua rasa kasih sayang, harapan, dan cita-cita dalam rumah tangga telah sirna disebabkan pertikaian, kesalahpahaman dan perselisihan yang tak kunjung henti, perkawinan akan berubah menjadi suatu hal yang membahayakan sehingga timbullah rasa saling membenci dan saling tidak mempercayai. Allah pada dasarnya melarang dan bahkan membenci perceraian, namun demi kepentingan kemashlahatan kedua belah pihak yakni suami dan istri yang terus bersetru dan tidak ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga mereka maka perceraian diperbolehkan sebagai langkah alternatif terakhir.

¹ Admin, *Apa Makna Islam*, <https://mirror.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28357/apa-makna-islam/#:~:text=Secara%20istilah%20Islam> diakses pada 20 Agustus 2024 Pukul 09.25 WIB

² Yufi, *Pernikahan Menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian, Syarat Sah*, <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan:menurut-pandangan-islam/> diakses pada 20 Agustus 2024 Pukul 09.27 WIB

Dijelaskan lebih lanjut bahwasannya setelah sepasang suami istri memutuskan untuk melaksanakan perceraian, istri dijatuhi suatu hukum yang kita kenal dengan istilah iddah. Secara bahasa kata *'iddah* artinya menghitung, atau bisa juga perhitungan, sehingga secara harfiah diartikan sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan. Kemudian secara istilah *'iddah* adalah salah satu konsekuensi berupa tenggang waktu yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian, entah itu perceraian yang disebabkan cerai talak ataupun kematian.³ Yang mana masa atau periode dari iddah dari istri ini berbeda-beda tergantung dari situasi atau sebab cerai dari wanita tersebut. Pertama, iddah karena perceraian selama 90 hari; kedua iddah karena ditinggal mati suami, selama 130 hari; dan yang ketiga iddah dari wanita hamil sampai bayinya lahir, kemudian untuk kasus wanita yang dicerai sebelum dikumpuli tidak dikenakan atau dijatuhi masa iddah. Ketentuan Al-Qur'an tentang *'iddah* merupakan suatu ketetapan yang mutlak dan harus diikuti oleh umat manusia demi kemashlahatan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. *'Iddah* merupakan suatu kewajiban bagi setiap perempuan yang telah dicerai oleh suaminya dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 153: "*Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa 'iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami*".⁴

Namun terkait problematika ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak seringkali masih diperbincangkan. Karena ketentuan ini selalu dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau tidaknya perempuan yang telah ditalak. Dengan kata lain, *'iddah* dimaksudkan untuk memastikan bersihnya rahim dari wanita tersebut. Maka akan sangat logis

³ Abd al-Rahman al-Jajiri, *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahibal-Arbaah*, Beirut Dal al-Fikr, 1972, IV, hal. 392, dalam "*Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", oleh Dermina Dalimunthe, (Jurnal El-Ahli: Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1, 2023), hal. 104.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)*, pasal 153, hal. 47.

jika *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan, karena berkaitan dengan gender (jenis kelamin) dan bersifat kodrati atau tidak bisa dirubah. Seiring dengan perkembangan waktu yang mana ilmu dan teknologi semakin maju dan mutakhir, tentunya hal ini turut membawa pengaruh terhadap manusia. Mulai dari pola pikir, pola hidup, dan pola sosial, perubahan-perubahan yang disebabkan dengan kemajuan ilmu teknologi dan juga pengaruh perjalanan zaman tersebut turut mempengaruhi norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku di lapisan masyarakat dan bahkan negara.

Seperti yang kita ketahui hukum memiliki sifat memaksa, mengikat, mengatur dan melindungi hak dari masing-masing individu. Menurut Hans Kelsen, salah satu ahli hukum sekaligus filsuf yang terkemuka dari Austria, hukum sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu hukum bersifat statis dan bersifat dinamis.⁵ Hukum bersifat statis memiliki pengertian hukum sebagai sistem norma yang berlaku, hukum dalam kondisi istirahatnya atau sistem norma yang berlaku. Hukum ini berhubungan dengan kondisi manusia yang pada beberapa sendi kehidupannya bersifat statis (tetap atau diam), yang mana biasanya hukum ini memiliki strata kemutlakan terhadap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan hukum bersifat dinamis memiliki makna hukum yang masih dalam tahap dibuat serta diterapkan atau bahkan yang tengah berjalan. Hukum dinamis memiliki pemahaman bahwa hukum memiliki sifat berubah-ubah dari waktu ke waktu atau tidak tetap karena mengikuti perkembangan zaman serta perubahan pola hidup masyarakat dengan tujuan untuk menangani permasalahan-permasalahan baru yang belum diatur oleh peraturan atau hukum sebelumnya.

Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan yang di *ridlai* Allah S.W.T., Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam merupakan segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan

⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 8.

akhirat, yang mana hal ini mencakup seluruh ajaran Islam meliputi bidang akidah, ibadah, akhlaq, serta muamalah.⁶ Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadits, dan kemudian *Ijtihad*. Sebagai umat muslim sudah seharusnya kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai dasar hukum yang paling utama, salah satunya yang berkaitan dengan gender yakni perempuan yang mengalami *haidl*, *nifas*, *istihadlah*, dan lain sebagainya termasuk juga *'iddah*. Permasalahan tersebut tergolong kedalam kategori aspek statis (*nomostatics*), perbuatan yang diatur oleh hukum. Karena hal ini sudah tidak dapat diganggu gugat atau bersifat *naluriyah*, yang sudah diatur dan ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah.

Akan tetapi seiring perkembangan zaman, akibat adanya hukum tetap yang sudah tidak bisa diubah ataupun diganggu gugat, seringkali beberapa orang berperilaku semena-mena terhadap kelompok yang dijatuhkan kemutlakan hukum tersebut. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya hukum yang dirasa terlalu mendiskriminasi terhadap eksistensi suatu kelompok seperti pada kaum perempuan harus ditelaah serta dilakukan pengkajian ulang, untuk menjamin keadilan dapat terlaksana secara pasti tanpa memandang gender. Salah satu kasus yang kita bahas adalah mengenai permasalahan *'iddah*. Pada dasarnya memang benar dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* wanita yang telah diceraikan oleh suaminya entah itu cerai hidup atau mati akan dijatuhkan sebuah ketentuan berupa *'iddah*. Pada fase tersebut wanita dibatasi pergaulannya, gaya hidup, aktivitas sehari-hari dan bahkan juga kariernya.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tentunya hal ini tidak dapat diganggu ataupun diubah. Akan tetapi pemerintah mampu melakukan suatu upaya seperti menciptakan undang-undang ataupun peraturan yang isinya mampu mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan diskriminasi

⁶ Admin, *Pengertian Hukum Islam dan Sumbernya*, <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/#:~:text=Pengertian%20hukum> diakses pada 19 September 2024 Pukul 13.52 WIB.

terhadap kaum perempuan. Sehingga sudah sewajarnya menjadi kewenangan pemerintah untuk menciptakan kebijakan atau peraturan demi kemashlahatan warga negaranya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa': 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisaa': 58)⁷

Kemudian dijelaskan pula dalam Q.S. Shad: 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الدَّيْنَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman,) “*Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*” (Q.S. Shad: 26)⁸

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Hakikat Kewajiban Pemimpin dalam Islam Hakikat kepemimpinan dalam pandangan Islam secara garis

⁷ Qur'an kemenag, *Qur'an* surah An-Nisaa': 58, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176> diakses pada 09 Desember 2024 Pukul 14.58 WIB.

⁸ Qur'an kemenag, *Qur'an* surah Shad: 26, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/38?from=26&to=88> diakses pada 09 Desember 2024 pukul 14.59 WIB.

besar terbagi menjadi lima ruang lingkup, yakni sebuah tanggung jawab bukan hak istimewa, pengorbanan bukan fasilitas, kerja keras bukan santai, wewenang melayani bukan sewenang-wenang, teladan dan perintis bukan *clubman*. Sehingga seorang pemimpin diharuskan dan diwajibkan untuk senantiasa tanggap responsif dalam menerima keluhan serta hal-hal yang disukari oleh warga negaranya.

Pada dasarnya yang menjadikan ketentuan *'iddah* ini mendiskriminasi kaum perempuan adalah disaat mereka masih menjalani masa *'iddah* mereka, mantan suami mereka sudah dapat beraktivitas dengan lancarnya sampai menikah lagi tanpa ada belenggu atau kesulitan apapun, ditambah seringkali mantan suami enggan untuk memberikan nafkah-nafkah yang timbul saat seorang suami menceraikan istrinya, terlebih lagi nafkah *'iddah*. Oleh sebab itu atas dasar *mubadalah* atau kesetaraan akan lebih baik jika si mantan suami turut dibebani ketentuan *'iddah* seperti yang berlaku pada diri si mantan istri. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan hukum dapat terlaksana, menjaga mental dari wanita yang mana kemungkinan besar wanita menderita baik lahir maupun batin, sebagai bentuk rasa solidaritas ataupun tenggang rasa, untuk memberi kesempatan kedua bilamana dirasa ada harapan untuk rujuk kembali, serta sebagai bentuk upaya mengantisipasi adanya niat poligami terselubung dari mantan suami.

Pemikiran baru demikian ternyata sudah ada dan tertuang dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), didalamnya memuat dan membahas tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan juga perwakafan. Konsep mengenai *'iddah* bagi laki-laki disebutkan dalam pasal 88 Counter Legal Draft yang berbunyi, (1) *Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau 'iddah. (2) Selama dalam masa transisi mantan suami atau mantan istri diperbolehkan rujuk.* Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 88 ayat 7 yang berbunyi, (7) *Masa 'iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut: a. Apabila perkawinan putus karena kematian,*

*maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari. b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi istrinya.*⁹ Dari beberapa uraian diatas sudah sewajarnya pemerintah merenungkan baik-baik langkah untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya tanpa memandang apapun termasuk gender dari warga negaranya tersebut, dengan membuat ataupun merevisi peraturan sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum Internasional.

Perkembangan pemikiran yang demikian merupakan hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, tentunya harus memiliki peraturan yang mampu memberikan kenyamanan serta ketertiban pada masyarakatnya. Sehingga tidak keliru perkembangan pemikiran mengenai hukum berkembang dengan pesat yang mengakibatkan terjadinya pembaharuan hukum dari masa ke masa. Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, karena hukum keluarga dianggap sebagai inti dari syariah. Pada dasarnya bukan dimaksudkan kepada umat muslim tata cara atau praktiknya bagaimana berumah tangga kelak dimasa mendatang, namun hukum disini bersifat solutif yang bermakna memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat pada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Alasan utama peneliti melakukan penelitian yang mendasarkan pada saat *'iddah* karena pada waktu tersebut merupakan waktu dimana menurut pandangan peneliti dirasa terlalu membebankan satu pihak saja, yaitu perempuan. Padahal kita tidak tahu secara langsung dan pasti apa saja yang sudah dilalui oleh pihak perempuan selama berumah tangga dengan si

⁹ Ridwan, *Membongkar Fikih Negara Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Unggun Relligi, 2005), hal. 182.

mantan suami. Adanya kemungkinan kekerasan baik secara fisik maupun verbal sudah pasti hampir dialami oleh setiap wanita yang diceraikan oleh mantan suaminya. Kekerasan itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah ekonomi, perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perjudian, mabuk, dan banyak diantara lainnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dilansir dari laman CNBC Indonesia,¹⁰ pada tahun 2023 penyebab utama perceraian di Indonesia yang pertama adalah perselisihan terus menerus dengan jumlah kasus mencapai 251.828, disusul dengan masalah ekonomi dengan kasus sebanyak 108.488, menelantarkan atau meninggalkan salah satu pihak sebanyak 34.322 kasus, kemudian kekerasan dalam rumah tangga mencapai 5.174 kasus, sedang yang lainnya disebabkan oleh kasus mabuk dan perjudian.

Dengan luka yang sudah ditorehkan oleh mantan suami pastinya menimbulkan trauma yang mendalam bagi perempuan, baik itu secara fisik maupun psikis. Setelah bercerai, mantan suami akan dibebani kewajiban berupa memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa *'iddah* nya tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya hal ini tidak bisa menjamin mantan suami memenuhi nafkah *'iddah* ataupun nafkah *mut'ah*, disebabkan oleh beberapa aspek, salah satunya istri diancam untuk tidak meminta nafkah *'iddah* ataupun *mut'ah* dengan nominal yang terlalu tinggi atau bahkan diancam untuk tidak meminta nafkah-nafkah tersebut dalam masa *'iddah* nya, dan jika sudah demikian bahkan pengadilanpun kesulitan memberikan eksekusi dalam hal ini. Maka dari itu demi menjaga kesehatan mental dari pihak perempuan, ketentraman batin kedua belah pihak, serta sebagai bentuk tenggang rasa, diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum yakni berupa *'iddah* bagi laki-laki. Pemberlakuan ini dimaksudkan

¹⁰ Taufani, 5 *Penyebab Perceraian Paling Banyak di RI, Ternyata Bukan Selingkuh*, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240615093818-128-546846/5-penyebab-perceraian-paling-banyak-di-ri-ternyata-bukan-selingkuh#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Badan%20Pusat,dalam%20rumah%20tangga%2C%20dan%20mabuk> diakses pada 19 September 2024 pukul 14.47 WIB.

yaitu selain untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan diskriminasi gender yang saat ini masih sering dan banyak kita jumpai, juga sebagai bentuk upaya pencegahan niat poligami terselubung dari pihak mantan suami, serta tentunya untuk membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Peneliti menggunakan perspektif hukum Islam dan juga *Mubadalah*, karena masa *'iddah* identik dengan umat Islam, yang mana hal ini otomatis peneliti memilih untuk menggali pemahaman-pemahaman seputar permasalahan tersebut dari kaca sudut pandang hukum Islam, dengan menelaah dan mencoba mencari kembali nash-nash dalam *Qur'an* maupun dari *Hadits* dan juga fiqih-fiqih klasik serta fiqih-fiqih kontemporer, yang memiliki kaitan ataupun hubungan dengan pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki. Sedangkan disatu sisi menggunakan sudut pandang *mubadalah* yang merupakan bentuk kesetaraan untuk mendukung pemahaman tentang pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki. Karena hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah S.W.T. dalam keadaan yang sama, dan Allah tidak membedakan derajat ataupun kedudukan manusia melalui jenis kelaminnya, melainkan dari segi tingkat ketakwaan dan juga keimanan manusia tersebut. Hal ini tertuang dalam Firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat: 13 yang artinya: *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”* (Q.S. Al-Hujurat: 13).¹¹

Pencetusan ide yang sebelumnya tidak diatur dan disebutkan dalam *Qur'an*, *hadits*, kitab fiqih yang demikian semata-mata bukanlah upaya untuk menciptakan syariat baru, akan tetapi sebagai upaya untuk membuat

¹¹ QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13, Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> diakses pada 19 September 2024 pukul 19.35 WIB.

kemaslahatan bagi setiap individu sehingga terciptanya kehidupan sosial antar umat manusia menjadi lebih tertata dan harmonis. Sebagai salah satu contoh kebijakan pemerintah berupa pencatatan perkawinan, pembatasan usia kawin, dan juga pengaturan mengenai poligami. Hal tersebut merupakan contoh dimana dalam sumber hukum Islam tidak diatur namun pemerintah membuat kebijakan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengatur dan membawa kemaslahatan bagi warga negaranya, begitu pula niat adanya ide yang dicetuskan oleh peneliti Hal inilah yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “Pemberlakuan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan *Mubadalah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini yaitu tentang Pemberlakuan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan *Mubadalah*, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pemberlakuan masa '*iddah* bagi laki-laki perspektif hukum Islam klasik?
2. Bagaimana hukum pemberlakuan masa '*iddah* bagi laki-laki perspektif hukum Islam kontemporer?
3. Bagaimana pemberlakuan masa '*iddah* bagi laki-laki perspektif *mubadalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan pemberlakuan masa '*iddah* bagi laki-laki perspektif hukum Islam klasik.

2. Untuk menjelaskan lebih dalam tentang hukum pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki perspektif hukum Islam kontemporer.
3. Untuk mendeskripsikan pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki perspektif *mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu, serta dapat mengembangkan keilmuan dan menambah wawasan daya analisis peneliti.

b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi dalam pemahaman mengenai pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki pasca ditinjau dari perspektif hukum islam dan *mubadalah*.

c. Bagi masyarakat umum

Manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman, khususnya kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberlakuan masa *'iddah* terhadap laki-laki pasca perceraian, disamping *'iddah* diberlakukan untuk istri. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan mental si istri, menjunjung rasa solidaritas (tanggung rasa), serta menghindari kemungkinan buruk lainnya seperti salah satunya poligami terselubung.

2. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi mahasiswa dan juga masyarakat, terutama untuk

memahami problematika yang seringkali muncul dan menjadi tantangan besar dalam rumah tangga. Disamping itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut serta dapat menambah wawasan dan juga referensi tentang ilmu hukum keluarga, agar dapat digunakan penelitian lain yang serupa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah memiliki tujuan memberikan definisi agar tidak terjadi kesalah pemahaman dalam memahami judul proposal skripsi “Pemberlakuan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan *Mubadalah*”. Maka dari itu peneliti perlu memberikan penegasan teori terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam menyusun proposal skripsi ini.

1. Penegasan Konseptual

a. *Iddah*

Masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah bercerai. Masa iddah ini memiliki tujuan untuk memberikan waktu bagi wanita tersebut untuk bersumpah dan memulihkan diri setelah kehilangan suami atau mengakhiri pernikahannya.¹² Selama masa iddah, seorang wanita diharapkan untuk tetap tinggal di rumahnya dan tidak boleh menikah atau menjalin hubungan dengan pria lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi wanita tersebut untuk menenangkan diri dan memulihkan diri secara emosional, serta memastikan bahwa rahim wanita dalam keadaan benar-benar bersih. Selain itu, masa iddah juga memberikan kesempatan bagi pihak keluarga dan masyarakat sekitar untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada wanita yang sedang

¹² Admin, *Apa Itu Masa Iddah*, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-masa-iddah/#:~:text=Masa%20iddah%20adalah%20periode%20tunggu,kehilangan%20suami%20atau%20mengakhiri%20pernikahnya> diakses pada 20 Agustus 2024 pukul 11.23 WIB

berduka. *'iddah* adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan *quru'* (masa suci). Tujuan melakukan *'iddah* adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Sebab dikhawatirkan, seorang wanita sedang mengandung saat akan menikah lagi sehingga anaknya akan menjadi anak pria yang dinikahi.¹³

b. Pasca Perceraian

Pasca merupakan kata yang bermakna sesudah atau setelah. Berdasarkan kamus kata-kata serapan asing dalam Bahasa Indonesia (2003) karya JS Badudu, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta (Sanskrit) yang dilafalkan seperti “c” dalam “beca”, sehingga pasca dieja dan dibaca pasca, bukan paska. Berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan, kata pasca merupakan salah satu bentuk terikat. Artinya kata pasca sendiri ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya, seperti pascademokrasi, pascapanen, dan pascastroke.¹⁴ Menurut seorang psikolog terkemuka asal Amerika Serikat, Elizabeth B. Hurlock perceraian adalah penyelesaian perkawinan ketika suami dan istri tidak menemukan jalan keluar atas masalah yang tidak membuahkan kebahagiaan.¹⁵ Sedangkan menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, perceraian adalah pemutusan perkawinan antara dua individu yang diputuskan oleh pengadilan, dan ada alasan yang cukup

¹³ Syekh Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini, Kitab Kifayatul Akhyar (Terbitan: Darul Kkhair, Damaskus, Tahun 1994, Cetakan pertama, jilid 1, hal. 423.) dalam CNN Indonesia, *Masa Iddah Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Syarat, Jenis, dan Larangan*, [https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240115143132-569-1049686/masa-iddah-dalam-islam-pengertian-hukum-syarat-jenis-dan-larangan#:~:text=ADVERTISEMENT-,Pengertian%20iddah,dst.\)%20menguraikan%20tentang%20iddah.&text=Artinya:%20%22Iddah%20adalah%20nama%20masa,menjadi%20anak%20pria%20yang%20dinikahi](https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240115143132-569-1049686/masa-iddah-dalam-islam-pengertian-hukum-syarat-jenis-dan-larangan#:~:text=ADVERTISEMENT-,Pengertian%20iddah,dst.)%20menguraikan%20tentang%20iddah.&text=Artinya:%20%22Iddah%20adalah%20nama%20masa,menjadi%20anak%20pria%20yang%20dinikahi) diakses pada 19 September 2024 pukul 19.44 WIB.

¹⁴ Sari, *Ulas Bahasa Pasca,Paska, Sesudah atau Setelah?*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/11/21/pasca-paska-sesudah-atau-setelah> diakses pada 19 September 2024 pukul 20.07 WIB.

¹⁵ Hurlock (2011), *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, hal. 54. Dalam repository Unika, <https://repository.unika.ac.id/2101/7/09.13.0050%20Ika%20Setiyani%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada 19 September 2024 pukul 20.03 WIB.

untuk menunjukkan bahwa pasangan orang-orang ini tidak akan dapat hidup bersama satu sama lain dengan rukun lagi.¹⁶ Sehingga dari kedua pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pengertian dari pasca perceraian adalah masa yang telah atau sudah dilalui oleh seseorang setelah melangsungkan serangkaian proses pemutusan perkawinan antara dua individu sesuai dengan ketentuan syariah dan administrasi hukum yang berlaku yang dilaksanakan dimuka pengadilan.

c. Perspektif Hukum Islam

Seperangkat peraturan yang berasal dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang mengatur tentang tingkah laku manusia mukallaf. Hukum Islam diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.¹⁷ Perspektif hukum Islam dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat dari sudut pandang syariat Islam.¹⁸

d. *Mubadalah*

Suatu perspektif yang meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi sosial, dan mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil, dan memberi manfaat kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Perspektif ini memastikan hadirnya prinsip-prinsip *ta'āwun* (saling menolong), *tahābub* (saling mencintai), *tasyāwur* (saling memberi pendapat), *tarādhin* (saling rela), dan *ta'āshur bil ma'rūf* (saling memperlakukan secara baik) dalam setiap relasi sosial.¹⁹ Perspektif kesalingan dalam relasi dua pihak, dengan demikian, mengakar pada

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁷ Hamdan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Nusa Tenggara Barat: Tasamuh Vol. 4, No. 1, 2016), hal. 89.

¹⁸ Disik, *Metode Penetapan Hukum Islam Menurut al-Syāthibī (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrā' al-Ma'nawī)*. (AL-'ADALAH Vol. XI, No. 2, Juli 2013), hal. 207.

¹⁹ https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah&mobileaction=toggle_view_desktop diakses pada 20 Agustus 2024 pukul 11.40 WIB

tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kemanusiaan. Dengan perspektif ini, dua pihak dalam sebuah relasi diharuskan untuk bersikap ramah dan memaanusiakan, tidak mendiskreditkan, tidak menganggap rendah, dan tidak menghegemoni, serta tidak melakukan kekerasan dan segala bentuk kezaliman.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual pada judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan judul penelitian ini secara operasional, yang mana penelitian ini berjudul “Pemberlakuan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan *Mubadalah*”. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana penerapan masa *iddah* yang biasa dijalani oleh kaum perempuan pada saat sesudah diputuskannya ikatan perkawinan oleh pengadilan, turut diberlakukan pada kaum laki-laki sesudah mereka mengucapkan ikrar talak atau setelah dijatuhkannya putusan terputusnya ikatan perkawinan antara laki-laki dengan mantan istrinya.

Yang mana penelitian ini nantinya akan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan juga sudut pandang *mubadalah*. Sudut pandang hukum Islam sendiri tentunya nanti akan memfokuskan pencarian pada sumber-sumber hukum Islam yang berlaku seperti *Qur'an*, *hadits*, dan juga *ijtihad* para ulama yang sekiranya membahas tentang penelitian yang akan diteliti. Disamping itu peneliti akan mencoba mengkorelasikan analisa hasil peninjauan dari sudut pandang hukum Islam dengan sudut pandang *mubadalah*. *Mubadalah* sendiri merupakan suatu paham yang identic dengan kesetaraan, adil, tanpa adanya diskriminatif.

Dengan demikian diharapkan penelitian dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang konkrit dan jelas mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti, mengingat banyaknya laki-laki yang bertindak semena-mena terhadap perempuan bahkan ketika mereka sudah bercerai

dengan enggan memenuhi kewajibannya berupa memberikan nafkah *'iddah* pada istri, atau melangsungkan pernikahan secara langsung dengan istri baru setelah bercerai, dan mengantisipasi adanya niat poligami tersembunyi yang direncanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh mantan suami. *'iddah* bagi laki-laki ini dimaksudkan untuk menjaga kewarasan serta menjaga kesehatan mental kedua belah pihak, khususnya pihak perempuan, sebagai wujud rasa tenggang rasa, dan juga sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi setiap individu tanpa adanya diskriminasi.

F. Metode Penelitian

a. Pola/Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini diaplikasikan model pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu prosedur penelitian yang memfokuskan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang akan diteliti melalui sumber bacaan yang dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan naskah atau dokumen-dokumen lainnya. menghasilkan data deskriptif analitis. Peneliti akan mencari dari berbagai sumber bacaan yang terkait dan berhubungan dengan pokok pembahasan masalah dengan tujuan memperoleh sebanyak-banyaknya informasi dari permasalahan yang dibahas.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yakni berupa bahan yang menghasilkan penjelasan hukum primer, bahan yang menghasilkan penjelasan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, buku-buku, dalam penulisa ini melihat dari buku

Wahbah Zuhaili dan Fakihuddin Abdul kodir, hasil penelitian dan jurnal atau pendapat pakar dalam bidang hukum. Bahan data hukum sekunder yang lain adalah dari naskah akademik rancangan Perundang-undang yang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder yang lain diantaranya pendapat para ahli hukum yang ditulis dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dari media cetak maupun elektronik, dalam hal ini fokus pada pembahasan Pemberlakuan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan *Mubadalah*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen dan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan- bahan hukum, bahan hukum skunder dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupaun melalui media internet. Agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Data-data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini didapat dari sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan, penulis juga memperolehnya melalui data-data di internet, serta jurnal yang membahas penelitian terkait. Dalam melaksanakan studi pustaka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang mana diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung dari sumbernya.
- b. Menginventarisasi bahan hukum diperlukan dalam penelitian.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan.
- d. Menganalisi bahan hukum sesuai dengan masalah dan penelitian hukum

d. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan bahan hukum yang sudah diperoleh dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah di olah. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis penelitian normatif adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c. Pembentukan standar-standar hukum.
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum

e. Prosedur Penelitian

Disini penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai konsep pemberlakuan *'iddah* bagi laki-laki dalam perspektif hukum islam, kemudian akan menganalisis pemberlakuan *'iddah* bagi laki-laki menggunakan perspektif *mubadalah*. Setelah tahapan diatas sudah dilalui, maka seluruh hasil yang telah dianalisis dan disusun secara sistematis kemudian ditulis dalam bentuk skripsi mulai dari bagian awal, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, paparan hasil penelitian, penutup, sampai dengan bagian akhir.

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan literatur yang peneliti temukan berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis:

1. *SYIBHUL 'IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH*, oleh AKHMAD MIFTAKHURROZAQ, UIN Walisongo Semarang Tahun 2022.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa konsep *syibhul 'iddah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan metode Intra doctrinal reform tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional dengan cara *tahyir* (memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama diluar madzhab), dapat pula disebut *tarjih*, dan *talfiq*, (mengkombinasikan sejumlah pendapat). Dengan mengkombinasikan sejumlah pendapat mengenai *syibhul 'iddah* maka laki-laki mempunyai masa tunggu setelah putusannya perkawinan di mana masa tunggu laki-laki sama dengan masa *'iddahnya* perempuan. Aspek keadilan hukum pada konsep *syibhul 'iddah* yang diberlakukan bagi suami, yakni dengan melihat dan mempertimbangkan paradigma nilai keadilan. Jadi seorang laki-laki harus menjalankan *syibhul 'iddah* akibat adanya putusannya perkawinan seperti yang dilakukan oleh perempuan untuk masa tenggunya.

Persamaan: penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan tema permasalahan yang serupa.

Perbedaan: penelitian ini menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* dalam menyelesaikan permasalahannya, sedangkan saya menggunakan perspektif Hukum Islam dan *Mubadalah*. Dari segi judul pun kami memiliki perbedaan.

2. *ANALISIS KEWAJIBAN SYIBHUL IDDAH BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI NOMOR P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, oleh REFADILA DEMIRA, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023.

Dalam penelitian tersebut diterangkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *iddah* istri memuat pelaksanaan kewajiban *syibhul iddah*, bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* maka ia harus menunggu sampai putusan hakim di Pengadilan Agama terhadap masa *iddah* tersebut selesai baru dapat melakukan pernikahan baru dengan perempuan lain. Jika bekas suami tersebut menikah lagi selama masa *iddah* istrinya sedangkan ia memiliki hak rujuk maka secara tidak langsung ia telah melakukan poligami ilegal atau dibawah tangan karena tidak mengikuti prosedur dan tata cara poligami yang telah di tetapkan. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yang mana lokasi penelitian pada penelitian ini adalah KUA Kec. Pekanbaru Kota, yang membedakan dengan karya ilmiah peneliti adalah metode penelitian yang dipakai serta perspektif dalam meneliti masalah yang diangkat.

Persamaan: penelitian ini menggunakan salah satu perspektif yang sama dengan saya yaitu perspektif Hukum Islam dalam menguraikan permasalahan, serta dengan tema permasalahan yang sama..

Perbedaan: penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris Kualitatif yang berlokasi di KUA Kec. Pekanbaru Kota. Disamping itu peneliti juga menggunakan SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI NOMOR P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 sebagai bahan tinjauan permasalahannya. Sedangkan saya menggunakan metode penelitian Normatif dengan tinjauan Hukum Islam dan *Mubadalah*.

3. PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA *IDDAH* ISTRI PERSPEKTIF *MASLAHAH* DALAM SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021, oleh SAMPURNA SI SIREGAR, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023.

Dari penelitian itu disebutkan bahwa dari beberapa poin yang tercantum didalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021

Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa *Iddah* Istri tersebut menjelaskan jika seorang suami ingin menikah lagi dengan wanita lain sementara istri yang bercerai darinya masih menjalani masa *iddah* sesuai dengan keadaannya, maka si suami tersebut haruslah menunggu masa *iddah* istrinya tersebut selesai dahulu. Dikarenakan masih ada kewajiban yang harus dijalankan oleh si suami kepada istri yang masih menjalani masa *iddahnya*. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri yang menganjurkan kepada laki-laki untuk tidak menikah pada masa *iddah* istri ini sejalan dengan prinsip yang ada pada masalah mursalah, yang mana prinsip yang ada pada masalah mursalah merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat, juga terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.

Persamaan: penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan tema permasalahan yang serupa.

Perbedaan: penelitian ini menggunakan perspektif *Maslahah* dengan meninjau SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 dalam meneliti permasalahannya, sedangkan saya menggunakan perspektif Hukum Islam dan *Mubadalah*. Dari segi judul pun kami memiliki perbedaan.

4. ANALISIS METODE *MAFHŪM MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP MASALAH '*IDDH* BAGI SUAMI, oleh MUHAMMAD ALDIAN MUZAKKY, UIN Walisongo Semarang Tahun 2019.

Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pandangan Faqihuddin mengenai metode *mafhum mubadalah* terhadap '*iddah* bagi suami, meskipun dijelaskan secara umum, ternyata metode tersebut, setelah penulis analisis, bisa diterapkan dalam teks-teks yang memuat ketentuan tentang „*iddah* sehingga menghasilkan ketentuan '*iddah* bagi

suami. Dengan mengikuti langkah-langkah pemaknaan *mubādalah*, yang dimana langkah-langkah tersebut memuat beberapa prinsip diantaranya adalah tentang berbuat baik dalam rumah tangga dan menjaga keutuhan rumah tangga, tentang kemitraan antara laki-laki dan perempuan, relasi dalam berumah tangga, saling mencintai dan rasa kasih sayang, berbuat baik pada seseorang, tidak menyakiti hati orang lain, menjauhi terhadap hal-hal yang buruk, serta tentang menjaga kehormatan seseorang. Adapun dampak yang timbul dari pemaknaan *mubādalah* terhadap *'iddah* bagi suami yaitu a) penundaan melaksanakan pernikahan, b) larangan untuk keluar rumah, dan c) masa berkabung (*iḥdād*). Semua dampak ini bertujuan dalam hal etika sosial. Karena serasa tidak pantas apabila suami bercerai seketika melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain atau beratraktif dengan perempuan lain.

Persamaan: penelitian ini juga menggunakan metode penelitian normatif seperti penelitian saya, sudut pandang yang dipakai dalam meneliti pun sedikit sama yakni menggunakan metode *mubādalah*. Disamping itu permasalahan yang diteliti juga sama yakni tentang *'iddah* bagi suami yang mana konteksnya disini sama saja dengan laki-laki.

Perbedaan: setelah peneliti (saya) membaca skripsi tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan yakni dimulai dari yang paling mencolok adalah segi judul, kemudian perspektif yang digunakan, yang mana skripsi diatas menggunakan metode *mafhum mubādalah* milik Faqihuddin Abdul Kodir dalam menganalisa permasalahan yang diangkat. Sedangkan saya menggunakan perspektif atau sudut pandang hukum Islam kemudian diikuti dengan sudut pandang *mubādalah*. Bila diteliti lebih dalam skripsi diatas lebih menekankan pendapat dari Faqihuddin melalui metode *mafhum mubādalah* miliknya.

5. SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 TENTANG *IDDAH* SUAMI DALAM

PERSPEKTIF *GENDER*, oleh MUHAMMAD ARDLI MUBARRAQ, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.

Kesimpulan yang disajikan dalam penelitian tersebut adalah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri yang salah satu isinya yaitu laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya. Maka ketika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain harus menunggu masa *'iddah* dari istri selesai baru dapat melakukan pernikahan yang baru. Maka dalam keadaan seperti itulah, *'iddah* suami dapat diterapkan supaya istri mendapat keadilan dan tidak adanya diskriminasi.

Persamaan: penelitian diatas menggunakan metode penelitian *library research* dan juga mengungkap permasalahan yang sama untuk diteliti, yakni tentang *'iddah* bagi laki-laki. Hal itu disebutkan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen BiMas Islam tahun 2021, yang mana didalamnya mengatur atau menyarankan agar diberlakukannya masa *'iddah* bagi mantan suami.

Perbedaan: penelitian diatas lebih memfokuskan untuk membahas keefektifan dan kekuatan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen BiMas Islam. Hal ini dibuktikan dengan rumusan masalah yang disebutkan dalam skripsi tersebut, yang mana kemudian dikaji atau ditelaah melalui kaca mata kesetaraan gender, apakah surat edaran tersebut dirasa sudah adil atau belum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti (saya) lebih fokus pada permasalahan yang diangkat yakni tentang pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki pasca perceraian dengan meninjau melalui sudut pandang hukum Islam yang mana nantinya akan membahas tentang dasar-dasar hukum dalam Islam serta bagaimana pendapat ulama fiqih, dan ulama siapa saja yang menghendaki diberlakukannya masa *'iddah* pada laki-laki. Kemudian ditinjau kembali dari sudut pandang *mubadalah* yang mana merupakan suatu pemahaman kesalingan atau keadilan dalam kehidupan sosial.

Dari segi judul pun kami terlihat jelas memiliki perbedaan yang cukup jauh.

6. KESETARAAN *GENDER* DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM : PENERAPAN MASA *IDDAH* BAGI LAKI-LAKI PASCA CERAI, oleh SITI IRHAM YUNUS, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Tahun 2023.

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa, (1) Fenomena Pernikahan Syibhul Iddah di Kota Parepare sejauh ini belum sepenuhnya di laksanakan oleh pihak laki-laki karena pemahaman masyarakat terkait masa iddah hanya untuk perempuan sehingga pada umumnya laki-laki tidak menjadi masalah ketika menikah dengan perempuan lain tanpa menunggu masa *iddah* istrinya selesai. (2) Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut di terapkan di beberapa Kantor Urusan Agama di Kota Parepare dengan beberapa pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti poligami terselubung, Kantor Urusan Agama menegaskan dan memberi peringatan kepada laki-laki untuk tidak melakukan pernikahan dalam masa *iddah* mantan istrinya, dalam hal ini berpendapat bahwa secara aturan agama sudah jelas yang memiliki masa iddah hanya perempuan berarti ketika laki-laki memiliki masa iddah melanggar Hukum Agama dan melanggar Hak Asasi Manusia. (3) Perspektif kesetaraan *gender* dalam hal masa '*iddah*' bagi laki-laki ini menimbulkan banyak hal dimana di kalangan masyarakat dan lingkungan akademisi ada yang menerima dan menentang surat edaran tersebut, menentang karena hak seseorang di atur oleh surat edaran dan diterima karena hal ini dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Pemberlakuan '*iddah*' bagi istri semata, jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direspon dan carikan solusi agar relasi gender antara suami dan istri terjalin dengan baik.

Persamaan: permasalahan yang diangkat untuk diteliti sama yakni tentang pemberlakuan masa '*iddah*' bagi laki-laki pasca cerai.

Perbedaan: perbedaan terletak pada judul yang digunakan yang mana terlihat jelas penelitian ini menggunakan perspektif kesetaraan *gender* yang diaplikasikan pada hukum keluarga islam khususnya pada masalah *'iddah* bagi laki-laki dan tentang bagaimana penerapan surat edaran dari Dirjen Bimas Islam di KUA Kota Parepare. Sedangkan peneliti (saya) menggunakan perspektif hukum Islam dan *mubadalah* dalam melakukan pendekatan dan menganalisa kasus. Ditambah metode penelitian yang digunakan juga berbeda karya skripsi diatas menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana studi kasus dilakukan di KUA Kota Parepare sehingga tergolong (*field research*) sedangkan peneliti (saya) menggunakan metode penelitian normative (*library research*) yang lebih memfokuskan menggali informasi melalui sumber-sumber data skunder. Yakni seperti buku, majalah, teks, naskah-naskah kuno, sejarah, dan atau dokumen yang sejenis lainnya.

7. PERSEPSI KEPALA KUA DI KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBERLAKUAN *SYIBHUL 'IDDAH* KEPADA LAKI-LAKI, oleh MUHAMMAD FATHULLAH, UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Penelitian ini memiliki kesimpulan Hasil penelitian ini bahwa persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki memiliki kesamaan yakni konsep *syibhul 'iddah* berbeda dengan *'iddah* karena mantan suami pada dasarnya tidak memiliki masa *'iddah*. Akan tetapi ada perbedaan penerapan terhadap konsep *syibhul 'iddah* bahwa Kepala KUA Kecamatan Cempaka dan Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang akan menolak mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang masa *'iddah* mantan istrinya belum berakhir. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin dan Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan masih mau mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang masa *'iddah* mantan istrinya belum berakhir. Alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarbaru menerapkan *syibhul 'iddah* adalah Surat Edaran

Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan beberapa dalil Q.S. al-Baqarah/2: 228, Q.S. ath-Thalaq/65: 4, dan Q.S. al-Ahzab/33: 49.

Persamaan: permasalahan yang diangkat untuk diteliti sama, yakni tentang *'iddah* bagi laki-laki.

Perbedaan: skripsi diatas menggunakan persepsi dari ketua KUA dari Kota Banjarbaru sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian, disamping itu peneliti diatas juga menggunakan metode penelitian empiris yang mana penelitian tersebut banyak dilakukan dilapangan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya melalui responden yang dituju.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan penelitian ini terstruktur dan mudah dipahami, maka diperlukan sistematika penulisan penelitian dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, trans literasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat uraian yang terdiri dari lima babdan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan pada bab ini peneliti memaparkan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan sebagai Langkah awal penelitian, dan juga metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau Teknik yang digunakan dalam penelitian pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki. Yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara

library research, yaitu dengan mengumpulkan data-data skunder dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data-data yang diperoleh peneliti pendapat para ahli hukum yang ditulis dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dari media cetak maupun elektronik, dalam hal ini fokus pada pembahasan Pemberlakuan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Pasca Perceraian. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian, serta terdapat penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pemaparan secara umum tentang pengertian *'iddah*, dasar hukum yang menjadi landasan berlakunya masa *'iddah*, macam atau jenis-jenis *'iddah* serta hal apa saja yang turut dibebankan saat seseorang menjalani masa *'iddah* baik dari pihak perempuan selaku istri maupun laki-laki selaku suami. Dilanjutkna dengan sub bab dari hukum islam yang nantinya akan memberikan penjelasan tentang pengertian hukum islam, dasar hukum dari adanya pemberlakuan masa *'iddah* dalam agama Islam. Selanjutnya memasuki sub bab yang akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan teori *mubadalah*. Diawali dengan pemaparan biografi singkat dari sosok pencetus teori *mubadalah*, pengertian dari teori *mubadalah*, dasar hukum dari teori *mubadalah*, cara kerja dan pengaplikasian dari teori ini dalam menganalisis problem yang ada.

Bab III peneliti akan memaparkan pembahasan hasil pengumpulan informasi dan juga data-data berdasarkan dengan rumussen masalah yang pertama, yaitu tentang bagaimana hukum pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki menurut hukum islam dari pandangan ulama fiqih klasik.

Bab IV pembahasan tentang bagaimana hukum pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki perspektif hukum Islam kontemporer. Setelah memperoleh data-data yang signifikan dan selaras dari apa yang hendak peneliti cetuskan, selanjutnya data akan dianalisis dalam bentuk analisis

diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki yang akan dikorelasikan menggunakan tinjauan dari perspektif hukum Islam kontemporer.

Bab V pemaparan data setelah memperoleh data-data yang signifikan dan selaras tentang bagaimana pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki perspektif *mubadalah*, guna menjawab rumusan masalah yang ada dari apa yang hendak peneliti cetuskan, selanjutnya data akan dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki yang akan dikorelasikan dengan ditinjau dari perspektif *mubadalah*.

Bab VI Penutup berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.